Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih - iii

Sekapur Sirih - v

Kata Pengantar 1 - xi

Kata Pengantar 2 - xvii

Kata Pengantar 3 - xxi

Prakata - xxiv

Bagian I

PENDAHULUAN -1

Latar Belakang - 1

Masalah dan Pemecahannya - 5

Pengertian Administrasi Kependudukan - 12

Bagian II

PENYELENGGARAAN DAN INSTANSI PELAKSANA - 21

Penyelenggara - 21

1. Pemerintah - 21

2. Pemerintah Propinsi - 24

3. Pemerintah Kabupaten/Kota - 26

Instansi Pelaksana - 28

1. Nomenklatur Instansi Pelaksana - 28
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana - 32
3. Petugas Registrasi - 34
4. Pejabat Pencatatan sipil - 37

Bagian III

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL BERBASIS SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - 41

Regulasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 - 41

Regulasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pada Saat Ini - 53

Pendaftaran Penduduk - 55

1. Beberapa Pengertian Terkait Dengan Pendaftaran Penduduk Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 - 55
2. Ruang Lingkup Pendaftaran Penduduk - 57
 1. Pencatatan Biodata Penduduk dan Penerbitan NIK - 58
 2. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) - 65
 3. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - 72
 4. Pendaftaran Peristiwa Kependudukan - 80
 - a. Perubahan Alamat - 80
 - b. Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (NKRI) - 81
 - c. Pendaftaran Penduduk WNI Yang Bertransmigrasi - 90
 - d. Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) - 91
 - e. Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI Ke Dan Dari Luar Negeri - 93

- f. Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing Dari Dan Ke Luar Negeri - 99
- g. Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas - 101
- h. Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan - 103

Pencatatan Sipil - 109

1. Beberapa Pengertian Terkait Pencatatan Sipil Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 - 109
2. Ruang Lingkup Pencatatan Sipil - 111
 1. Pencatatan Kelahiran - 113
 2. Pencatatan Lahir Mati - 120
 3. Pencatatan Perkawinan - 121
 4. Pencatatan Pembatalan Perkawinan - 130
 5. Pencatatan Perceraian - 131
 6. Pencatatan Pembatalan Perceraian - 134
 7. Pencatatan Kematian - 135
 8. Pencatatan Pengangkatan Anak - 137
 9. Pencatatan Pengakuan Anak - 143
 10. Pencatatan Pengesahan Anak - 144
 11. Pencatatan Perubahan Nama - 145
 12. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan - 146
 13. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya - 152
 14. Pembedulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil - 153

Penatausahaan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil - 154

1. Pintu Pelaporan - 154
2. Sarana Dan Prasarana - 155
3. Verifikasi Dan Validasi Data Penduduk - 157
4. Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil - 158

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Saat Negara Dalam Keadaan Darurat Dan Luar Biasa - 159

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan - 160

Bagian IV

**SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA
DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN - 167**

Sanksi Administratif - 167

Ketentuan Pidana - 175

Bagian V

**LANGKAH-LANGKAH GUNA MENUNJANG
KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - 181**

Delapan Langkah Sukses - 181

1. Langkah Pertama Dasar Hukum - 182
2. Langkah Kedua Program yang tersusun dalam Grand Design - 183
3. Langkah Ketiga Pemutakhiran Data kependudukan - 184
4. Langkah Keempat Pembangunan dan Pengembangan SIAK Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) - 194
5. Langkah Kelima Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) - 208
6. Langkah Keenam Melaksanakan Sosialisasi - 212
7. Langkah Ketujuh Penataan Kelembagaan - 213
8. Langkah Kedelapan Peralatan dan infrastruktur serta Pendanaan - 215

Bagian VI

PENUTUP - 217

Daftar Pustaka - 221

Daftar lampiran - 229

Lampiran I Data Jumlah Penduduk Per-Kabupaten/Kota Edisi Desember Tahun 2009 - 231

Lampiran II Daftar nama organisasi penghayat kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa tingkat pusat seluruh indonesia - 251